



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KANGPISMAN DI KELURAHAN SUKAMISKIN KECAMATAN ARCAMANIK)**

**Aep Saepudin<sup>1</sup>, Deden Hadi Kushendar<sup>2</sup>**

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara

### **Abstrak**

Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (KangPisMan) dalam pengelolaan sampah dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung melalui Program KangPisMan. Kendala-kendala dalam keberhasilan kebijakan program KangPisMan, diantaranya sumber daya manusia yang kurang memiliki kesadaran terhadap memilah sampah, kurangnya lahan untuk mengelola sampah dan kekurangan dana karena terhambatnya dana untuk program KangPisMan terkait pandemi covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan informan yang dipilih menggunakan sampling bertujuan (purposive) dengan 7 orang informan. Dalam mengatasi kurangnya kesadaran melalui sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah. Lalu meminta izin kepada pemilik tanah jika di daerah tersebut memiliki lahan kosong untuk pengelolaan sampah. Kemudian diadakan swadaya murni dari masyarakat melalui program iuran yang dikoordinir oleh Ketua Rukun Warga.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah, KangPisMan.

---

\*Correspondence Address : [aepsaepudin150278@gmail.com](mailto:aepsaepudin150278@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1302-1309

© 2021UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk di desa dan perkotaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, seperti kebutuhan makan, minum dan kebutuhan lainnya hal ini menyebabkan bertambahnya volume sampah dan karakteristik sampah yang beragam dari aktivitas konsumsi masyarakat tersebut seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah elektronik dan lain sebagainya. Kota Bandung adalah ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang asri dan indah sehingga sering disebut Kota Kembang, akan tetapi gelar tersebut bisa saja jadi hilang begitu saja karena Kota Bandung sedang menghadapi permasalahan sampah yang lumayan banyak dan merepotkan karena menumpuknya sampah diberbagai tempat di Kota Bandung yang disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPS) yang sedikit dan juga terbatas, dan mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan ke jalanan dan ke sungai.

Pengurusan permasalahan sampah di Kota Bandung memerlukan sistem manajemen yang baik dan cara yang dapat mengurangi sampah dengan efektif (Sekarningrum et al., 2021). Maka perencanaan dan pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan instansi yang terkait, melainkan mengikut sertakan perwakilan masyarakat di setiap daerah atau kecamatan. Jumlah penduduk Kota Bandung yang begitu banyak dengan jumlah penduduk Kota Bandung yang sampai 2,5 juta, sampah yang dihasilkan juga jadi meningkat. Dari perilaku dan pola hidup masyarakat membuat volume sampah menjadi meningkat hingga 1.600 ton per hari dimana jumlah 30 persen diantaranya adalah sampah an organik dan 10 persen diantaranya yaitu sekitar 100-150 ton adalah sampah plastik (Ekawati & Cahyati, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemkot Kota Bandung membuat program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (KangPisMan) untuk membuat Kota Bandung bebas dari sampah organik dan anorganik yang bisa digunakan kembali. Dari sampah organik yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman dan sampah anorganik yang bisa dijadikan hiasan dan memiliki nilai jual, selain dapat membuat lingkungan bersih dan subur sampah juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi hal tersebut belum berjalan sempurna, karena sampah organik dan sampah an organik masih banyak yang terbuang dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan mengelola sampah masih kurang.

Mendukung program KangPisMan dalam pengelolaan sampah (Ekawati & Cahyati, 2020; Rosalina et al., 2019), maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat kota Bandung khususnya di Kelurahan Sukamiskin betapa pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari menumpuknya sampah yang bisa membawa penyakit, terutama sampah plastik yang susah diurai oleh tanah dan diperlukannya kerjasama pemimpin daerah terhadap masyarakatnya untuk bisa melaksanakan program KangPisMan di kehidupan sehari-hari.

Menunjang program KangPisMan dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat kota Bandung khususnya di kelurahan sukamiskin betapa pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari menumpuknya sampah yang bisa membawa penyakit, terutama sampah plastik yang susah diurai oleh tanah dan diperlukannya kerjasama pemimpin daerah terhadap masyarakatnya untuk bisa

melaksanakan program KangPisMan di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kecamatan Arcamanik kelurahan Sukamiskin terdapat beberapa permasalahan pada implementasi pengelolaan sampah mulai dari belum semua RW yang menjalankan pengelolaan sampah, fasilitas penunjang pengelolaan sampah masih belum memadai, belum optimal nya sarana prasaranan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dengan program KangPisMan.

Kebijakan publik (Van Meter & Van Horn, 1975), dilihat dari perpektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public values). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensinya bagi berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan (Nakamura, 1987).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai kebijakan publik. Maka peneliti, dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah atau organisasi untuk kepentingan masyarakat dan negara. "Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses" (Tachjan, 2006: 38). Berdasarkan latar belakang, penelitian ini merupakan penelitian mengenai implementasi. Teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian adalah model implementasi kebijakan van Metter & van Horn yang disebut dengan istilah A Model of The Policy

Implementation, dan ada enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Spillane et al., 2002; Van Meter & Van Horn, 1975). Model implementasi kebijakan van Metter dan van Horn yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana, 5) Sikap para pelaksana, dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

## METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus (Somantri, 2005; Wahidmurni, 2017). Dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dan juga proses triangulasi dilakukan analisis data yang bersifat induktif dengan hasil penelitian lebih menekankan makna implematasi. Adapun tahapan dari penelitian yaitu

- 1) Tahapan Orientasi. Memastikan bahwa fokus permasalahan dapat dikembangkan menjadi pertanyaan sesuai dengan objeknya ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keberadaan objek penelitian yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai perencanaan lanjutan;
- 2) Tahap Ekplorasi. Pada tahap ini dilakukan interview atau wawancara dengan para narasumber/ informan kunci untuk dapat mengali data yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini merupakan tahap

pengumpulan data lapangan secara terpimpin, sesuai dengan pimpinan dan pertanyaan mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terdapat kendala terutama dari sisi Sarana prasarana dan fasilitas; dan

- 3) Tahap Membercheck. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan temuan menurut prosedur yang tepat dan memperoleh laporan akhir. Pengecekan data dilakukan pada subjek informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang diperoleh serta melakukan penghalusan data yang diberikan oleh subjek maupun informan dan diadakan perbaikan baik dari bahasa maupun sistematikanya, agar dalam pelaporan hasil penelitian memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Tahap ini peneliti melakukan pencocokan data yang diperoleh sesuai dengan standar teori, termasuk adu pendapat antara informan dengan peneliti, dengan solusi hasil pemecahan masalah berupa kesepakatan antara peneliti dengan informan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Standar dan sasaran kebijakan merupakan perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya (Spillane et al., 2002; Van Meter & Van Horn, 1975). Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting dalam setiap pelaksanaan

kebijakan atau program. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas. Sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan dengan adanya kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan, tingkat keberhasilannya dapat diukur apakah kebijakan tersebut berhasil sebagaimana yang menjadi tujuannya ataukah mengalami kegagalan.

Standar kebijakan pada program KangPisMan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bandung bebas sampah dan dapat mengelola sampah dengan baik, maka diperlukan kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dinas terkait, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah standar kebijakan program KangPisMan sebagai Pedoman Umum Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah program KangPisMan di Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi sasaran dalam program KangPisMan yaitu pengurus daerah dan masyarakat Kota Bandung. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan Daerah Kota Bandung yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; sampah spesifik.

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan sasaran, tetapi juga menyediakan sumber daya yang digunakan untuk mendukung sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi manusia, sarana dan prasarana, serta dana yang

diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif. Sumber daya tersebut berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan didukung adanya sarana & prasarana dan dana yang tersedia dan memadai.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dana untuk melaksanakan program KangPisMan sumber dananya dari PIPPK (Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan) sebesar 10% dengan berhubung ada pandemi COVID-19 dana tersebut jadi terhambat, untuk menangani kekurangan dana di Kelurahan Sukamiskin ini menggunakan swadaya murni atau biasanya di setiap RW ada dana kas. Itu yang dipakai untuk keperluan program KangPisMan. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam melaksanakan setiap kegiatan. Implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Sumber daya terbagi dalam tiga jenis diantaranya sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial (dana). ketiga sumber daya ini adalah sebagai penunjang keberhasilan program KangPisMan. Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi program KangPisMan ketersediaan sumberdaya manusia dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang utama. Dalam hal ini peneliti menemukan masalah dari segi

sumberdaya manusia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih belum bisa memilah sampah.

Melihat pada sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KangPisMan peneliti menemukan temuan masalah yaitu di beberapa RW tidak adanya lahan untuk mengelola sampah. Lalu dana untuk pelaksanaan KangPisMan peneliti menemukan temuan masalah yaitu dana PIPPK untuk pelaksanaan KangPisMan jadi terhambat karena adanya COVID-19. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan/komunikasi yang baik akan mendapatkan suatu implementasi yang baik pula.

Mengacu pada pendapat dari Van Mater dan Van Horn, karakteristik merupakan variabel yang juga mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari ciri-ciri atau sifat pada agen pelaksananya. Bagaimana agen pelaksana tersebut turut menunjang dalam kinerja implementasi kebijakan sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, Standard Operating System (SOP), dan sanksi. Berdasarkan hasil wawancara pihak kelurahan selalu mengadakan sosialisasi tentang program KangPisMan di RW secara langsung. Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dimana kebijakan disampaikan. Unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain yaitu: Pemahaman dan pengetahuan isi dan tujuan kebijakan; Respon pelaksana terhadap implementasi kebijakan; Intensitas dari respon pelaksana. Dalam dimensi

penilaian mengenai sikap para pelaksana, terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi (pemahaman) serta respons (dukungan / persetujuan) agen pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti ketahui bahwa respon (dukungan/persetujuan) dari semua agen pelaksana dan masyarakat sangat mendukung untuk melanjutkan program KangPisMan karena sangat membantu untuk mencapai keberhasilan program dan untuk membersihkan daerah dari sampah dan membuat sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Karakteristik agen pelaksana Program KangPisMan ini berasal dari Bapak Walikota dan yang menjadi leading sector nya ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, lalu dari kelurahan sebagai penyelenggara teknis program KangPisMan, lalu RW dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki pergerakan yang dinamis di dalamnya. Dimana pengaruh-pengaruh yang muncul tidak jarang tidak dapat diprediksikan. Oleh sebab itu, variabel ini juga menjadi variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik menurut Van Mater dan Van Horn, yaitu sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program KangPisMan lebih efektif dibanding dengan program

sebelumnya, bisa dilihat dari program yang sekarang menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan sampah yang dikirim ke TPS juga sudah berkurang dibanding dengan program sebelumnya. Adapun di Kelurahan Sukamiskin melaksanakan hubungan/komunikasi dengan organisasi lainnya secara konsisten. informal (melalui WA/telepon) atau mendatanginya secara langsung. Penyampaian informasi juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ke beberapa RW dengan didampingi pihak DLHK dan melaksanakan sosialisasinya tidak melalui situs atau website.

Sikap para pelaksana berdasarkan hasil wawancara bahwa organisasi pelaksana kebijakan telah memahami tentang isi dan tujuan kebijakan, sehingga pada implementasi program KangPisMan ini dari pendapat berbagai pihak telah memiliki frekuensi yang sama atau kesepahaman dengan satu suara yang sama bahwa program KangPisMan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Mengenai respon (dukungan/pesertujuan) pelaksana sementara ini peneliti menganalisis semua agen pelaksana sepenuhnya mendukung program KangPisMan.

Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan Eksternal juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik disamping dari lingkungan internal organisasi. Penulis melihat kondisi Sosial sudah sangat bagus dengan kondisi yang menengah keatas sehingga sangat mendukung dalam pelaksanaan program KangPisMan tapi masih ada beberapa orang yang belum antusias terhadap program KangPisMan ini.

Melihat segi ekonominya juga sudah sangat mendukung program KangPisMan dilihat dari ekonomi yang menengah ke atas. Terkait dengan situasi politik. Sejauh dilaksanakannya program KangPisMan hingga sekarang belum ada

penolakan-penolakan terhadap program tersebut. Implementasi kebijakan program masih tetap berjalan baik dan kondusif. Lingkungan eksternal mendukung adanya program KangPisMan, bahwa adanya program KangPisMan mendapat tanggapan yang baik di masyarakat Kota Bandung sehingga situasi politik dalam implementasi KangPisMan ini relatif terkendali sehingga tidak menimbulkan penolakan-penolakan atau konflik dari masyarakat.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dapat dilihat kendala dihadapi dalam implementasi program KangPisMan, yaitu: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah; 2) Kurangnya lahan untuk mengolah sampah; dan 3) Kekurangan dana untuk program KangPisMan karena dana dari PIPPK terhambat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dalam mengatasi kurangnya kesadaran ialah dengan cara disosialisasikan tentang pemilahan dan pengelolaan sampah dan jika masih belum memilah sampah, sampahnya tidak akan diangkut oleh petugas sampah; 2) Upaya dalam mengatasi kurang atau tidak adanya lahan untuk mengelola sampah yaitu dengan cara meminta izin kepada pemilik tanah jika di daerah tersebut memiliki lahan kosong jika tidak sampahnya akan di bawa ke daerah yang memiliki lahan pengelolaan sampah; dan 3) Upaya dalam masalah Dana yang kurang untuk program KangPisMan yaitu dengan adanya swadaya murni yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu iuran-iuran dari masyarakat dilingkungan para RW itu sendiri atau biasanya menggunakan uang kas RW.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan program KangPisMan berjalan dengan baik dan lancar, namun merujuk hasil penelitian ditemukan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki. Tahapan pelaksanaan program KangPisMan dimulai dari sosialisasi, usulan mengenai pengelolaan sampah, Penyaluran dana. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan masalah yaitu dana untuk pelaksanaan program KangPisMan tertunda karena COVID-19. Kendala-kendala dalam keberhasilan kebijakan program KangPisMan, yaitu diantaranya sumber daya manusia yang kurang memiliki kesadaran terhadap memilah sampah, kurangnya lahan untuk mengelola sampah dan kekurangan dana karena terhambatnya dana PIPPK untuk program KangPisMan karena COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dalam mengatasi kurangnya kesadaran ialah dengan cara disosialisasikan tentang pemilahan dan pengelolaan sampah dan jika masih belum memilah sampah, sampahnya tidak akan diangkut oleh petugas sampah. Serta upaya dalam mengatasi kurang atau tidak adanya lahan untuk mengelola sampah yaitu dengan dengan meminta izin kepada pemilik tanah jika di daerah tersebut memiliki lahan kosong jika tidak sampahnya akan di bawa ke daerah yang memiliki lahan pengelolaan sampah dan upaya dalam masalah Dana yang kurang untuk program KangPisMan yaitu dengan adanya swadaya murni yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu iuran-iuran dari masyarakat dilingkungan para RW itu sendiri atau biasanya menggunakan uang kas RW. Untuk membuat program KangPisMan berhasil ini perlu kesadaran masyarakat dan kebijakan dari ketua RW setempat, dan untuk dipertegas lagi kepada ketua RW untuk masyarakat yang belum memilah sampah.

## **REFERENCES**

Ekawati, N., & Cahyati, A. (2020). Environmental education (Eco Education) in the family through the Kang Pisma Movement. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 151-164.

Nakamura, R. T. (1987). THE TEXTBOOK POLICY PROCESS AND IMPLEMENTATION RESEARCH. *Policy Studies Review*, 7(1), 142-154.

Rosalina, A., Sundawa, D., & Mulyadi, A. (2019). The Implementation of Kang Pisman Program to Improving Students ` Ecological Intelligence. 4(2), 39-44.

Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2021). Penerapan Model Pengelolaan Sampah "Pojoek Kangpisman." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 548. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.29740>

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65. <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>.<https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>

Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy implementation and cognition: Reframing and refocusing implementation research. *Review of Educational Research*, 72(3), 387-431. <https://doi.org/10.3102/00346543072003387>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/00953997750060044>

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif: Vol. Juli (Nomor 1, hal. 1-17).